

Berdasarkan tabel di atas, besar konsumsi RT lebih tinggi untuk sektor pangan dibandingkan non pangan selama periode tahun 2016-2017.

### 2.1.1.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

#### A. Jenis Dan Jumlah Bank dan Cabang-Cabangnya

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

**Tabel 2.87**  
**Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2015 –2017**

Uraian	2015	2016	2017
<b>Bank Umum</b>			
Konvensional	10	9	9
Syariah			
<b>BPR</b>			
Konvensional	5	5	5
Syariah			
<b>Total</b>	17	15	14

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin

#### B. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Air Bersih (clean Water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat

diminum setelah dimasak. Berikut adalah data rumah tangga di Kabupaten Tapin yang menggunakan air bersih.

**Tabel 2.88**  
**Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2014 – 2016**

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih	15.037	15.037	28.017
2	Jumlah rumah tangga	45.980	45.980	50.343
3	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	32,70	32,70	55.48

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin 2014, 2015, 2016

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih masih 55,48% di tahun 2016.

#### 2.1.1.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

##### A. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh

tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan tingkat sarjana.

**Tabel 2.89**  
**Rasio Lulusan Sarjana**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2015**

NO	Uraian	2015
1	Jumlah lulusan Sarjana Muda	1,985
2	Jumlah lulusan Sarjana Lengkap	5,098
3	Jumlah lulusan Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap	7,083
4	Jumlah penduduk	181,778
5	Rasio lulusan (3/4)	3.90%

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2017

### **B. Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Pada Tahun 2014 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 47,56 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 47,56 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Adapun tahun 2016 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 47,25 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang

berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 47,25 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin kecil rasio ketergantungan akan semakin baik.

**Tabel 2.90**  
**Rasio Ketergantungan**  
**Di Kabupaten Tapin Tahun 2014–2016**

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	49,879	50,308	50,650
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	7,872	8,168	8,496
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	57,751	58,476	59,146
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	121,415	123,302	125,184
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	47.56%	47.43%	47.25%

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka 2015, 2016, 2017

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pada Tahun Anggaran 2018 anggaran untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar Rp.1.230.096.574.939,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp.630.274.924.814,- dan belanja langsung Rp.599.821.650.125,-. Dana belanja langsung dilaksanakan oleh SKPD pemerintah daerah Kabupaten Tapin untuk membiayai program dan kegiatan SKPD. Hasil realisasi dari pelaksanaan Belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp.512.254.851.558,- Belanja Tidak Langsung Rp.574.943.574.216,- Total realisasi belanja adalah Rp.1.087.198.398.774,- atau sebesar 88,38 persen, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan mendekati hasil yang maksimal, namun belum cukup menggambarkan seberapa baik realisasi pelaksanaan dari rencana atau seberapa hebat perencanaan yang telah disusun.

### 2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berikut adalah telaahan mengenai hasil evaluasi program dan indikator kinerja kegiatan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2018 :

**Tabel 2.91**  
**Hasil Evaluasi Program dan Indikator Kinerja**  
**RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2018**

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
<b>01</b>	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>				
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	67,00	70,05	104,55
2	Persentase penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf	persen	100,00	100,00	100,00
3	Prosentase Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	persen	100,00	98,72	98,72
4	Angka partisipasi sekolah	persen	58,80	71,92	122,31
5	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	persen	97,10	84,73	87,26
6	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	persen	86,91	91,86	105,70
<b>02</b>	<b>BIDANG KESEHATAN</b>				
1	Ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan	persen	100,00	76,00	76,00
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar	skore	7,80	-	-
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	persen	100,00	75,00	75,00
4	Cakupan Pelayanan Puskesmas dengan Standar Terakreditasi	persen	53,00	23,00	43,40
5	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	persen	35,00	-	-
6	Persentase Desa Siaga Aktif	persen	63,00	-	-
7	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	persen	46,00	-	-
8	Persentase Balita dengan Status Gizi Baik	persen	74,00	77,54	104,78
9	Persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan	persen	76,00	-	-
10	Persentase Tempat-tempat Umum Yang memenuhi Syarat Kesehatan	persen	75,00	-	-
11	Persentase desa / kelurahan yang mencapai UCI	persen	95,00	-	-
12	Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	persen	100,00	-	-
13	Meningkatnya sarana dan Prasarana serta ketersediaan & kemudahan akses masy thd pelayanan kesehatan yg berkualitas	persen	100,00	-	-
14	Persentase Peserta BPJS Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar	persen	100,00	68,00	68,00
15	Angka Kematian Bayi Per 1000 KH	/1000	16,00	-	-
16	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	/100.000	175,00	-	-
17	Tingkat Kepuasan pelanggan RSUD	skore	88,38	75,67	85,62
18	Bed Occupancy Rate (BOR)	persen	60,00	49,03	81,72
19	Length Of Stay (LOS)	hari	6	0,17	2,83
20	Bed Turn Over (BTO)	kali	40	0,94	2,35
21	Turn Over Interval (TOI)	hari	1	0,30	30,00
22	Netto Death Rate (NDR)	Permil (<)	25,00	0,50	2,00
23	Gross Death Rate (GDR)	Permil (<)	45,00	35,64	79,20
24	Nilai SAKIP RSUD		B		
<b>03</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
1	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam	persen	65,00	50,00	76,92

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kondisi Mantap				
2	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Aliran Air Tidak Tersumbat	persen	100,00	75,00	75,00
3	Prosentase Panjang Tebing Sungai Yang Bebas Rawan Bencana	persen	31,82	40,40	126,96
4	Panjang Jalan Kabupaten yang terpelihara		60,00	60,00	100,00
5	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	persen	65,00	60,00	92,31
6	Cakupan Data dan Informasi Jalan dan Jembatan	persen	100,00	75,00	75,00
7	Prosentase sawah yang terlayani Jaringan Irigasi Kabupaten Tapin	persen	25,00	75,79	303,16
8	Terbangunnya Sarana Sanitasi & Air Limbah		85,00	75,00	88,24
9	Jumlah Pembangunan di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		85,00	75,00	88,24
10	Persentase Jalan Lingkungan, Akses Air Bersih, Sarana Sanitasi dan Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	persen	85,00	45,00	52,94
11	Persentase Keseuaian Pembangunan Infrastruktur PU (SDA Bina Marga Cipta Karya) dengan Rencana Struktur Ruang (persen)	persen	25,00	25,00	100,00
12	Persentase Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dan Izin Pemanfaatan Ruang yang Diterbitkan (persen)	persen	45,00	40,00	88,89
13	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis yang Berizin (persen)	persen	15,00	10,00	66,67
14	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	persen	85,00	70,00	82,35
15	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	persen	85,00	78,00	91,76
<b>04</b>	<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
1	Tercapainya lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	15,00	11,00	73,33
2	persentase peningkatan pertumbuhan jumlah pengunjung di Ruang Terbuka hijau (RTH)	persen	90,00	70,00	77,78
3	Tercapainya prasarana dan sarana umum yang layak	persen	20,00	14,00	70,00
<b>05</b>	<b>BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
1	Cakupan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persen	83,00	91,00	109,64
2	Cakupan pelayanan kebakaran dan waktu	persen	100,00	25,00	25,00
3	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	persen	100,00	66,00	66,00
4	Persentase rasio cakupan petugas Linmas di Kabupaten	persen	80,00	66,00	82,50
5	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan sesuai waktu tanggap	persen	90,00	67,00	74,44
6	Persentase pengurangan lokasi / kondisi rawan bencana	persen	80,00	20,00	25,00
7	Persentase objek terdampak bencana yang ter rehabilitasi dan terekonstruksi	persen	90,00	-	-
8	Persentase konflik sosial yang dapat diatasi	persen	80,00	50,00	62,50
9	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah yang dapat dilaksanakan dgn baik	kegiatan	5,00	3,00	60,00
10	Persentase Ormas yang aktif	persen	70,00	60,00	85,71
<b>06</b>	<b>BIDANG SOSIAL</b>				

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	persen	74,41	63,46	85,28
2	Persentase rumah tidak layak huni yang mendapatkan perbaikan	persen	2,27	-	-
3	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	100,00	75,00	75,00
4	Persentase penyandang disabilitas dan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	7,20	6,30	87,50
5	Meningkatnya Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	persen	75,00	85,60	114,13
6	Persentase Peningkatan Partisipasi PSKS (TKSK, Orsos, Penyuluh Sosial, PSM, KT)	persen	56,10	32,40	57,75
7	Persentase Makam pahlawan dan monumen dalam kondisi yang baik dan terpelihara	persen	100,00	75,00	75,00
8	Persentase Masyarakat yang bermasalah sosial psikologis yang dilayani melalui LK3	persen	22,00	25,70	116,82
9	Persentase PSKS dalam melayani PMKS	persen	56,10	56,10	100,00
10	Persentase Peningkatan Panti asuhan/LKSA yang memberikan pelayanan dengan baik	persen	100,00	100,00	100,00
11	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	87,00	71,70	82,41
12	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	20,00	23,30	116,50
<b>II</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>				
<b>07</b>	<b>BIDANG TENAGA KERJA</b>				
1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	persen	49,00	18,74	38,24
2	Persentase pencari kerja siap pakai	persen	30,00	2,75	9,17
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	persen	49,00	18,74	38,24
4	Persentase penurunan kasus hubungan industrial	persen	- 29,00	83,33	- 287,34
5	Persentase peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja	persen	100,00	99,53	99,53
6	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	persen	100,00	100,00	100,00
<b>08</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK</b>				
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan P2TP2A	persen	76,00	-	-
2	Persentase Pernikahan Usia Muda	persen	0,57	0,05	8,25
3	Persentase Jumlah Perempuan Binaan yang Mandiri dalam Usaha Rumahan dan Memiliki Kreatifitas	persen	0,98	0,85	86,73
4	Rasio Tenaga Perempuan dibidang Tenaga Laki-laki	persen	0,65	0,68	104,62
5	Rasio Pejabat Perempuan sebagai Pejabat di SKPD	persen	0,0017	0,0035	205,88
6	Rasio Jumlah Perempuan yang Menjabat di Parlemen	persen	0,0005	0,0001	12,00
7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Petugas Tertatih dalam UPT	persen	0,98	0,67	68,37
8	Persentase Jumlah Unit Pelayanan Terpadu yang mencatat dan Melaporkan data Kekerasan	persen	25,00	25,00	100,00
9	Persentase Jumlah Perempuan binaan yang mandiri dalam usaha rumahan dan memiliki Kreatifitas	persen	0,88	0,85	96,59

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Persentase SKPD Kabupaten yang memiliki Focal Point PUG yang aktif	persen	33,30	66,07	198,41
11	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan petugas terlatih dalam UPT	persen	0,98	0,67	68,37
12	Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	0,98	0,98	100,00
13	Rasio Tenaga Perempuan di bidang tenaga laki-laki	persen	0,65	0,68	104,62
14	Persentase Jumlah Perempuan binaan yang mandiri dalam usaha rumahan dan memiliki Kreativitas	persen	0,88	0,88	100,00
15	Persentase jumlah perempuan binaan yang mandiri dalam usaha rumahan dan memiliki kreativitas	persen	0,88	0,85	96,59
16	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan petugas terlatih dalam UPT	persen	0,38	0,67	176,32
17	Jumlah SKPD yang melaksanakan TPRG	persen	0,81	0,50	61,73
18	Persentase peningkatan gugus tugas KLA aktif dalam pencapaian KLA	persen	75,00	75,00	100,00
19	Persentase forum anak daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan	persen	75,00	75,00	100,00
20	Persentase peningkatan jumlah sekolah ramah anak (SRA) yang dikembangkan	persen	0,43	-	-
21	Persentase peningkatan jumlah puskesmas ramah anak (PRA)	persen	8,30	-	-
<b>09</b>	<b>BIDANG PANGAN</b>				
1	Rata-rata harga gabah di tingkat petani pada saat panen	%	1,62	1,62	100,00
2	Ketersediaan dan Kecukupan Energy (kkal/kap/hari)	kkal/kap/h	11.395,24	11.395,20	100,00
3	Ketersediaan dan Kecukupan Protein (gram/kap/hari)	gr/kap/har	276,74	276,74	100,00
4	PPH Ketersediaan	%	98,70	98,70	100,00
5	Persentase Skor sampel Yang Lulus uji	Sampel	3,00	3,00	100,00
6	Skor PPh	%	83,50	83,50	100,00
<b>10</b>	<b>BIDANG PERTANAHAN</b>				
1	Tertatanya pengelolaan pertanahan	persen	50,00	20,00	40,00
2	Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan	persen	12,00	9,00	75,00
3	Meningkatnya pelayanan pertanahan	persen	20,00	80,00	400,00
4	Tersedianya sistem pendaftaran tanah	persen	50,00	40,00	80,00
<b>11</b>	<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				
1	Persentase Jalan Kota dan Area Publik dengan Tingkat Kebersihan Lebih Besar	%	81,00	70,00	86,42
2	Persentase Jumlah Bank Sampah Yang Terbentuk dan Aktif Beroperasi	%	100,00	60,00	60,00
3	Tingkat Kualitas Udara Membaik	%	100,00	75,00	75,00
4	Persentase terbentuknya Lokasi perlindungan SDA dan pengelolaan kawasan konservasi di Kabupaten Tapin	%	100,00	-	-
5	Sistem informasi SDA dan Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kualitasnya	%	100,00	100,00	100,00
6	Persentase kasus pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>12</b>	<b>BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
1	Persentase penduduk ber KTP	%	99,00	99,09	100,09
2	Persentase keluarga ber KK	%	100,00	89,85	89,85
3	Persentase bayi berakte kelahiran	%	32,24	33,24	103,10
4	Persentase Akta kelahiran	%	36,00	43,74	121,50
5	Persentase berakte nikah	%	72,00	100,00	138,89
6	Tingkat Akurasi Data Kependudukan	%	80,00	88,21	110,26
7	Tercapainya pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	%	100,00	100,00	100,00
8	Persentase pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	%	70,00	82,35	117,64
<b>13</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
1	Persentase posyantek ( pos pelayanan teknologi) yang berkualitas	%	50,00	40,00	80,00
2	Persentase Desa Dengan Pemerintahan Desa Yang Terstandar	%	20,00	13,00	65,00
3	Persentase peningkatan pendapatan asli desa.	%	37,00	32,00	86,49
<b>14</b>	<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
1	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	%	2,21	-	-
2	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS ) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi ( Unmeet Need )	%	3,85	-	-
3	Persentase PUS anggota Poktan yang aktif	%	81,40	58,30	71,62
4	Persentase PUS anggota Poktan yang ber -KB	%	81,40	-	-
5	Menurunkan Angka Kelahiran	%	2,11	-	-
6	Persentase PUS yang aktif ber -KB	%	83,68	-	-
<b>15</b>	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>				
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	%	100,00	80,26	80,26
2	Cakupan Pengelolaan Lalu-lintas Angkutan Jalan	%	100,00	47,19	47,19
3	Cakupan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	%	75,00	72,12	96,16
4	Cakupan Pengelolaan Sungai dan Penyeberangan	%	80,00	5,83	7,29
<b>16</b>	<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
1	Persentase infrastruktur IT non-pemerintah yang sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Kegiatan Pemkab yang disebarluaskan melalui berbagai media	%	80,00	65,00	81,25
<b>17</b>	<b>BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				
1	Persentase Koperasi Berkualitas	%	26,00	23,28	89,54
2	Persentase Koperasi aktif	%	83,00	82,39	99,27
3	Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha	%	4,51	4,49	99,56
4	Pertumbuhan Wirausaha Terlatih	%	21,00	21,00	100,00
<b>18</b>	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				
1	Persentase MOU investasi yang ditandatangani	%	100,00	-	-
2	Pertumbuhan investasi	%	120,00	64,60	53,83
3	Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	%	1,00	0,57	57,00
4	Tingkat Kepuasan Pelayanan	%	80,00	80,58	100,73

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Persentase peningkatan nilai IKM	%	5,00	5,00	100,00
6	persentase jumlah aduan yang diselesaikan	%	100,00	66,70	66,70
7	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM	%	100,00	100,00	100,00
8	Persentase jenis dan kualitas Perizinan yang terlayani	%	100,00	91,66	91,66
9	Persentase jumlah permohonan izin sesuai ketentuan yang disetujui	%	100,00	91,66	91,66
<b>19</b>	<b>BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				
1	Prosentase peningkatan pemuda berprestasi ditingkat provinsi dan nasional	persen	100,00	73,58	73,58
2	Prosentase peningkatan pemuda berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	persen	18,18	16,38	90,10
3	Prosentase pemuda kader yang berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat	persen	100,00	22,10	22,10
4	Prosentase organisasi kepemudaan dan pramuka yang dibina	persen	100,00	22,10	22,10
5	Prosentase pemuda yang mandiri	persen	100,00	77,89	77,89
6	Prosentase sarana prasarana olahraga yang memadai	persen	100,00	54,20	54,20
7	Prosentase prestasi Olahraga Paralympic di tingkat provinsi	persen	66,67	62,38	93,57
8	Prosentase prestasi olahraga tradisional dan rekreasi di tingkat provinsi	persen	41,67	-	-
9	Prosentase peningkatan peserta olahraga massal & rekreasi	persen	100,00	93,24	93,24
10	Prosentase peningkatan ragam jenis olahraga tradisional yang aktif	persen	100,00	-	-
11	Prosentase pelatih olahraga prestasi yang mendapatkan sertifikat	persen	100,00	-	-
12	Prosentase prestasi olahraga pelajar di tingkat provinsi	persen	75,00	73,62	98,16
13	Prosentase prestasi olahraga prestasi di tingkat provinsi	persen	100,00	100,00	100,00
14	Prosentase atlet olahraga prestasi dan olahraga pelajar yang tersedia	persen	100,00	100,00	100,00
<b>20</b>	<b>BIDANG STATISTIK</b>				
	Persentase SKPD yang telah memiliki sistem database secara online (%)	persen			
<b>21</b>	<b>BIDANG PERSANDIAN</b>				
	Persentase Peningkatan Keamanan Informasi/Persandian (%)	persen			
<b>22</b>	<b>BIDANG KEBUDAYAAN</b>				
1	Prosentase jumlah penonton/pengunjung event seni-budaya	%	98,57	30,00	30,44
2	Prosentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang terawat dengan baik	%	100,00	38,75	38,75
3	Jumlah sanggar seni budaya Daerah yang dibina		7,00	47,96	685,14
<b>23</b>	<b>BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	80,00	70,75	88,44
2	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung (Pemustaka)	%	0,80	0,18	22,50
3	Persentase Peningkatan Jumlah Anggota Perpustakaan	%	11,73	2,84	24,21
4	Persentase Peningkatan Jumlah Peminjam Buku	%	1,03	0,50	48,54
5	Persentase Peningkatan Jumlah Buku yang Dipinjam	%	0,36	0,10	27,78

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Persentase Bahan Perpustakaan yang diolah dan diperbaiki	%	3,50	5,21	148,86
<b>24</b>	<b>BIDANG KEARSIPAN</b>				
1	Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	%	33,33	24,44	73,33
2	Persentase Peningkatan Jumlah Pengolah Arsip Terampil	%	20,00	-	-
<b>III</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
<b>25</b>	<b>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
1	Peningkatan Produksi Ikan Budidaya	%	9,46		-
2	Peningkatan produksi Ikan Tangkap	%	1,85	2,05	110,81
3	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap	53,45	53,90	100,84
<b>26</b>	<b>BIDANG PARIWISATA</b>				
1	Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD)	%	3,00	1,23	41,00
2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik/nusantara	%	11,11	7,56	68,05
3	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	%	16,67	2,10	12,60
4	Rata-rata lama kunjungan atau lama menginap para wisatawan	%	1,00	0,63	63,00
5	Jumlah pengusaha ekonomi kreatif		20,00	-	-
6	Jumlah masyarakat yang mengerti tentang sapa pesona pariwisata		40,00	-	-
7	Jumlah Objek wisata yang telah dikelola dengan baik		69,57	45,00	64,68
<b>27</b>	<b>BIDANG PERTANIAN *</b>				
1	Persentase peningkatan produksi padi	%	2,70		-
2	Persentase peningkatan produksi palawija Jagung	%	0,60		-
3	Persentase peningkatan produksi palawija Kedelei	%	0,60		-
4	Persentase peningkatan produksi palawija Kacang Tanah	%	0,67		-
5	Persentase peningkatan produksi palawija Kacang Hijau	%	15,00		-
6	Persentase peningkatan produksi palawija Ubi Kayu	%	0,71		-
7	Persentase peningkatan produksi palawija Ubi Jalar	%	0,79		-
8	Persentase RMU yang melaksanakan tata kelola manajemen yang baik	%	10,00		-
9	peningkatan produksi hortikultura Jeruk	%	25,00		-
10	Persentase kelompok tani yang melaksanakan pengolahan hasil hortikultura (%)		1,00		-
11	Peningkatan luas lahan fungsional	ha	200,00		-
12	Persentase peningkatan produksi Karet	%	3,00		-
13	Persentase kelompok tani RPBSK kategori baik	%	5,00		-
14	Produksi Telur	%	0,43		-
15	Konsumsi Daging	Kg/Kap	0,18		-
16	Persentase kelas kelompok tani lanjut	%	33,58	25,00	74,45
<b>28</b>	<b>BIDANG PERDAGANGAN</b>				
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Barang Beredar Sesuai Dengan	%	75,00	90,00	120,00

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ketentuan				
2	Persentase Pertumbuhan Sistem Resi Gudang	%	100,00	75,00	75,00
3	Kontribusi Sektor PDRB Perdagangan	%	8,00	0,39	4,82
4	Meningkatkan mutu pelayanan pengelolaan pasar di kabupaten	%	4,00	-	-
<b>29</b>	<b>BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Bidang Perindustrian	%	3,88	3,76	96,91
2	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Pada Bidang Perindustrian	%	0,27	0,27	100,00
<b>30</b>	<b>BIDANG TRANSMIGRASI</b>				
<b>IV</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>31</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>				
1	Nilai Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten		3,00	3,00	100,00
2	Persentase Kasus Konflik Yang Terfasilitasi	%	100,00	25,00	25,00
3	Persentase Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar	%	100,00	100,00	100,00
4	Persentase lembaga keagamaan dan sosial yang mendapatkan bantuan sosial keagamaan	%	18,00	17,24	95,78
5	Persentase tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan	%	10,00	5,44	54,40
6	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	96,00	96,03	100,03
7	Persentase sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	%	95,00	80,86	85,12
8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	%	95,00	83,07	87,44
9	indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana	%	95,00	88,00	92,63
10	Persentase tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100,00	100,00
11	Tingkat Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	%	85,00	60,00	70,59
12	Persentase ASN yang memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa	%	75,00	60,00	80,00
13	Persentase penanganan sengketa terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah	%	75,00	60,00	80,00
14	Persentase Usulan Raperda/Perbup/Keppub Yang ditetapkan	%	100,00	100,00	100,00
15	Pesentase Perkara hukum yang diselesaikan	%	100,00	20,00	20,00
16	Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	%	100,00	100,00	100,00
17	Rata-rata kecepatan waktu penyampaian surat menyurat ke SKPD terkait di Lingkungan Pemkab Tapin	%	100,00		-
18	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	%	100,00		-
19	Persentase Pegawai yang administrasi kepegawaiannya dan pemenuhan pakaian dinas dilayani dengan baik	%	100,00		-
20	Tingkat kualitas administrasi perkantoran Lingkup Setda	%	80,00		-
21	tingkat tertib pengelolaan administrasi	%	100,00		-

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kepegawaian Sekretariat Daerah				
22	persentase penyelesaian dokumen keuangan Sekretariat Daerah tepat waktu	%	100,00		-
23	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	%	100,00		-
24	persentase kinerja kepala daerah/wakil kepala daerah	%	100,00		-
25	LHE SAKIP Kab.Tapin		61,00	51,65	84,67
26	Persentasinya OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100,00	55,00	55,00
27	prosentasi penyelesaian dokumen standar kompetensi jabatan dan beban kerja OPD	%	45,45	31,05	68,32
28	tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	%	80,00	80,00	100,00
29	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	%	90,00	68,00	75,56
30	Persentase Raperda yang tepat waktu	%	100,00	47,00	47,00
31	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	%	100,00	87,00	87,00
32	Persentase dukungan Kegiatan Fasilitasi anggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	100,00	60,00	60,00
33	indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan	%	85,00	75,00	88,24
34	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal 75	%	100,00	75,00	75,00
35	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	100,00	75,00	75,00
36	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat	%	100,00	91,63	91,63
37	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	%	100,00		-
38	Persentase usulan masyarakat (RKP Desa) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00
<b>32</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN</b>				
1	Persentase penurunan jumlah temuan	%	46,00	58,53	127,24
2	Lavel kapabilitas pengawas inter	%	1,00	1,00	100,00
3	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	%	90,00	81,80	90,89
4	Informasi hasil pengawasan terdokumentasikan dengan baik dan dapat dengan mudah ditemukan	%	100,00		-
<b>33</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>				
1	Persentase RENSTRA SKPD yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00
2	Persentase RENJA SKPD yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00
3	Tingkat kesesuaian RKPD dengan RENSTRA SKPD	%	100,00	100,00	100,00
4	Persentase program pembangunan yang memenuhi target	%	100,00		-
5	Tingkat keselarasan perencanaan dengan penganggaran mitra kerja Bidang Sosial dan SDM	%	100,00	100,00	100,00
<b>34</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				
1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Pengguna	%	80,00	70,00	87,50

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>35</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN</b>				
1	Ratio peserta yang mengikuti bimtek dengan jumlah skpd	%	100,00	100,00	100,00
2	Persentase penyelesaian APBD Kab.	%	100,00	42,85	42,85
3	Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00
4	Persentase waktu penyelesaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan yg berlaku	%	100,00		-
5	Persentase aset tetap tanah yang bersertifikat/bukti kepemilikan	%	100,00		-
6	Persentase peserta pelatihan/ bintek yang paham	%	100,00		-
7	Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian	%	80,00		-
8	Persentase Peningkatan Realisasi Piutang Daerah	%	80,00	50,65	63,31
9	Meningkatkan pelayanan yang prima kepada wajib pajak dan retribusi daerah	%	8,00	8,00	100,00
10	Persentase ketersediaan laporan pendapatan dan penerimaan daerah	%	100,00	100,00	100,00
<b>36</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				
1	Persentase pegawai ASN yang disiplin	%	99,00	75,00	75,76
2	Persentase Pejabat Administrator yang memenuhi syarat jabatan	%	100,00		-
3	Persentase Pejabat fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat jabatan	%	100,00		-
4	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi berdasarkan hasil assestment	%	100,00		-
5	Persentase pegawai yang kompeten	%	100,00	42,52	42,52
6	Persentase data kepegawaian yang akurat dan terkini	%	99,00	75,00	75,76
7	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	%	100,00		-

### 2.2.2. Realisasi RPJMD (Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu terhadap RPJMD atau Implikasi dari Realisasi terhadap Indikator RPJMD)

Program dan Kegiatan Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari periode pertama dari RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

Dengan demikian capaian indikator dalam evaluasi hasil RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2018, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan

bagian sebelumnya (sub bab 2.2.1.) yang merupakan tahun pertama RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 juga merupakan realisasi atau capaian kinerja RPJMD.

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

#### **2.3.1. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin terus mengalami peningkatan bila dibandingkan sebelumnya, namun pencapaian IPM sebesar 68,70 masih rendah bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 69,65 maupun IPM Nasional yang mencapai 70,81.

#### **2.3.2. Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar Rp.6.904.694.000.000,- dan pada tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp.7.433.273.000.000,-. Namun jika dilihat lebih luas ke dalam lingkup kawasan provinsi Kalimantan Selatan, angka PDRB Kabupaten Tapin tersebut hanya meliputi 4,66% dari nilai PDRB yang diciptakan seluruh Kabupaten dan Kota yang berjumlah Rp. 159.439.130,- (dalam jutaan). Posisi Tapin berada pada urutan ke 10 dari 13 Kabupaten/ Kota yang ada. Ini menandakan skala ekonomi Kabupaten Tapin termasuk kecil dibanding wilayah lain pada umumnya.

#### **2.3.3. Bidang Pendidikan**

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Tapin berdasarkan pengolahan data dan informasi daerah:

- a. Angka harapan lama sekolah yang masih rendah, yaitu: 11,52. Angka harapan lama sekolah masih berada di bawah angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 12,46.
- b. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapin selama periode tahun 2015-2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Data tahun 2016 angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 7,99 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 7,53.
- c. APM SLTA/MA/SMK Kabupaten Tapin tahun 2017 masih rendah di angka 48,73%.

- d. APK SLTA/MA/SMK Kabupaten Tapin tahun 2016 masih rendah di angka 75,62%.
- e. Rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI masih berfluktuasi.
- f. Rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan SMP/MTs masih berfluktuasi.
- g. Rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan SLTA/MA/SMK masih berfluktuasi.

#### **2.3.4. Bidang Kesehatan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Tapin berdasarkan pengolahan data dan informasi daerah:

- a. Jumlah puskesmas dan pustu yang tidak mengalami penambahan selama periode tahun 2015-2017. Sementara jumlah penduduk terus meningkat mengakibatkan rasio sarana kesehatan terus menurun
- b. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk mengalami penurunan dari 3,31 tahun 2015 menjadi 3,14 tahun 2017.

#### **2.3.5. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Tapin yaitu Persentase irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 65 persen tahun 2016 menjadi 45,17 persen pada tahun 2017.

#### **2.3.6. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Perkembangan penduduk dari tahun ke tahun selama beberapa tahun terakhir belum diimbangi dengan penambahan petugas polisi pamong praja dan petugas perlindungan masyarakat. Penambahan jumlah petugas sangat sedikit bila dibandingkan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal tersebut terlihat dari penurunan rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk sebesar 5,92 tahun 2015 menjadi 5,70 tahun 2017.

#### **2.3.7. Bidang Sosial**

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sosial di Kabupaten Tapin adalah persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial yang masih rendah, dimana pada tahun 2017 hanya 54,2% hal ini menunjukkan bahwa penanganan PMKS di Kabupaten Tapin masih perlu mendapat perhatian.

### 2.3.8. Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan tenaga kerja di Kabupaten Tapin yaitu:

- a. Rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja masih berfluktuasi. Rasio tertinggi sebesar 98,86 persen di tahun 2015, dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 95,61 persen di tahun 2017.
- b. TPAK belum optimal, masih berada di angka 71,75 persen di tahun 2015.
- c. Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2015 sebesar 5,14 persen mengalami penurunan menjadi 4,39 persen pada tahun 2017.

### 2.3.9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi terkait pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak yaitu indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih menunjukkan jumlah yang masih kecil yaitu 9,43 persen pada Tahun 2017. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang berjumlah 11,17 persen.

### 2.3.10. Bidang Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi terkait pertanahan di Kabupaten Tapin yaitu persentase Persentase cakupan data penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan yang masih rendah yaitu 8,3%. Walaupun angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaian sampai 2017 masih sangat kecil dan masih perlu ditingkatkan.

### 2.3.11. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang lingkungan hidup di Kabupaten Tapin yaitu:

- a. Persentase penanganan sampah masih rendah yaitu 47,18 persen di tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 42,19 persen. Angka ini masih jauh dari kondisi ideal untuk penanganan sampah.
- b. Persentase rumah tangga pengguna air bersih di tahun 2017 belum optimal yaitu: 55,48 persen. Walaupun angka dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan, namun pelayanan air bersih masih menjadi salah satu permasalahan layanan di Tapin yang masih perlu ditingkatkan.

### 2.3.12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam hal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan sebesar 87,34% yang masih harus ditingkatkan dimasa yang akan datang

### 2.3.13. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tapin adalah rasio akseptor KB yang terus mengalami penurunan dari 87,75% tahun 2015 menjadi 82,43% tahun 2017.

### 2.3.14. Bidang Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang perhubungan yaitu persentase angkutan darat dari tahun 2015 sejumlah 15,64 persen turun menjadi 2,28 persen di tahun berikutnya. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan berdampak bagi tidak optimalnya pelayanan angkutan umum kepada masyarakat.

### 2.3.15. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan koperasi, usaha kecil, dan menengah di Kabupaten Tapin yaitu Persentase Koperasi aktif stagnan selama tahun 2014-2016 yaitu berada di 81,69% namun pada tahun 2017 sedikit mengalami kenaikan menjadi 82,39%

### 2.3.16. Bidang Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Tapin yaitu:

- a. Produktifitas padi masih berfluktuasi selama tahun 2015-2017. Produktifitas tahun 2016 sebesar 52,02 kw/ha dan tahun 2017 naik menjadi sebesar 52,74 kw/ha.
- b. Produktifitas karet masih berfluktuasi selama tahun 2014-2016. Produktifitas tahun 2016 sebesar 594,50 Kg/Ha naik menjadi 603,09 Kg/Ha pada tahun 2017.

## BAB III

## KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah pada dasarnya menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2019, lebih memperhatikan perkiraan sumber-sumber pendapatan, besaran pendapatan dari sector-sektor potensial, kondisi perekonomian global dan regional yang ditunjukkan untuk mengalokasikan dengan suatu pendekatan *money follow program* yang pada akhirnya dapat tercapai suatu anggaran yang efektif dan efisien.

**3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kondisi perekonomian yang digambarkan melalui indikator makro ekonomi, secara umum merepresentasikan kondisi yang terjadi dan digunakan sebagai basis bagi penentuan kebijakan perekonomian pada masa selanjutnya. Secara umum, jika indikator makro ekonomi suatu daerah menunjukkan pertumbuhan positif maka kondisi keuangan di daerah tersebut cenderung stabil.

Secara ringkas, kondisi ekonomi makro Kabupaten Tapin tahun 2016 dan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**A. Inflasi**

Perekonomian Kabupaten Tapin tahun 2017 relatif terjaga dengan baik dengan laju inflasi sebesar 3,68 persen, hal tersebut dibarengi dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,12 persen.

**B. Kontribusi PDRB Kabupaten Tapin**

Perkembangan perekonomian suatu daerah biasanya diukur dengan tingkat produksi, yakni Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah *value added* yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah perekonomian. Nilai PDRB Kabupaten Tapin atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai produksi barang dan jasa dinilai dengan harga berlaku pada periode tahun 2018. Jika berdasarkan harga berlaku nilai PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2016 sebesar Rp.6.904.604.000.000,- dan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp.7.433.273.000.000,-, maka dalam harga konstan nilainya Rp.5.607.922.000.000,- pada tahun 2016, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.5.895.173.000.000,- pada tahun 2017. Berikut

gambaran nilai produksi barang dan jasa berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2010

**Tabel 3.1.**  
**Nilai produksi barang dan jasa**  
**berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2010**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (juta)		PDRB ADHK (juta)	
		2016	2017	2016	2017
1	Petanian, kehutanan, dan perikanan	1.519.401	1.624.791	1.144.707	1.207.734
2	Pertambangan dan penggalan	1.913.015	2.065.706	1.916.201	2.026.049
3	Industri pengolahan	482.529	522.257	354.860	366.232
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.962	6.842	4.562	4.623
5	Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah	21.799	23.413	16.611	17.387
6	Konstruksi	405.434	426.354	289.212	303.426
7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi	659.737	732.860	475.774	506.660
8	Transportasi dan Pergudangan	221.213	237.333	170.499	176.546
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	157.787	169.101	119.395	125.613
10	Informasi dan Komunikasi	246.419	263.652	206.256	213.996
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	77.740	85.133	56.628	59.563
12	Real Estat	99.944	104.308	78.285	80.743
13	Jasa Perusahaan	8.257	8.626	5.758	5.848
14	Administrasi Pertahanan	546.437	572.362	373.055	381.262
15	Jasa Pendidikan	348.336	383.557	257.940	274.783
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127.343	136.517	92.282	96.353
17	Jasa Lainnya	64.341	70.461	45.897	48.355
<b>PDRB</b>		<b>6.904.604</b>	<b>7.433.273</b>	<b>5.607.922</b>	<b>5.895.173</b>

Sumber : PDRB Kab Tapin, 2018

Jika dilihat lebih luas ke dalam lingkup kawasan provinsi Kalimantan Selatan, angka PDRB Kabupaten Tapin tersebut pada tahun 2017 hanya meliputi 4,66% dari nilai PDRB yang diciptakan seluruh Kabupaten dan Kota yang berjumlah Rp. 159.439.130,- (dalam jutaan). Posisi Tapin berada pada urutan ke 10 dari 13 Kabupaten/ Kota yang ada. Ini menandakan skala ekonomi Kabupaten Tapin termasuk kecil dibanding wilayah lain pada umumnya.

Tabel 3.2.  
Kontribusi PDRB Kabupaten Tapin terhadap  
PDRB Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kab/ Kota	Share PDRB Kab/ Kota (%)			
		2015	2016	2017	Rangking
1	Tanah laut	7,87	7,79	7,75	6
2	Kotabaru	13,26	13,29	13,40	2
3	Banjar	9,08	9,15	9,12	5
4	Barito Kuala	4,54	4,68	4,69	9
5	<b>Tapin</b>	<b>4,71</b>	<b>4,72</b>	<b>4,66</b>	<b>10</b>
6	HSS	3,48	3,58	3,56	12
7	HST	3,74	3,86	3,85	11
8	HSU	2,60	2,65	2,64	13
9	Tabalong	10,84	10,45	10,31	4
10	Tanahumbu	11,68	11,32	11,21	3
11	Balangan	6,76	6,45	6,31	7
12	Banjarmasin	16,77	17,31	17,52	1
13	Banjarbaru	4,74	4,92	4,98	8
<b>Kalsel</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>137.379.598</b>	<b>146.413.415</b>	<b>159.439.130</b>	

Sumber : PDRB Kab Tapin, BPS, 2018 (diolah)

### C. Pendapatan Perkapita dan pertumbuhan penduduk

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat didekati dengan ukuran pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita menggambarkan rata-rata tingkat produksi ataupun pendapatan yang mampu diciptakan untuk setiap penduduk dalam satu tahun, dengan demikian angka ini juga menggambarkan seberapa besar kemampuan perekonomian untuk memberikan kemakmuran secara rata-rata ditengah pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan Kabupaten Tapin maka akan terlihat kemampuan untuk memperluas/mempertinggi output/keluaran pada tingkat yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan populasinya hal ini sesuai dengan keadaan pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin dalam periode tiga tahun terakhir ini cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk

Tabel 3.3.  
PDRB Perkapita ADHB dan PDRB ADHK tahun 2015-2017

No	Tahun	PDRB Perkapita ADHB	PDRB Perkapita ADHK
1	2015	35.612.280,-	29.395.565,-
2	2016	37.457.842,-	30.423.273,-
3	2017	40.355.667,-	31.580.382,-

Sumber : PDRB Kab/ Kota di Kalsel, BPS, 2018 (diolah)

#### D. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum perekonomian Kabupaten Tapin mengalami pertumbuhan sedikit melambat, dimana sampai dengan tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin mencapai 5,12%. Laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 menunjukkan perlambatan senagai dampak dari menurunnya sektor Pertambangan dan penggalian.

Tabel 3.4.  
Pertumbuhan Ekonomi ADHK tahun 2015-2017

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017
1	Petanian, kehutanan, dan perikanan	5.93	6.36	5.51
2	Pertambangan dan penggalian	-0.60	2.20	5.73
3	Industri pengolahan	2.80	5.94	3.20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31.83	4.52	1.33
5	Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah	5.60	6.93	4.67
6	Konstruksi	6.24	5.87	4.91
7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi	7.92	8.75	6.49
8	Transportasi dan Pergudangan	6.78	5.93	3.55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.72	6.58	5.21
10	Informasi dan Komunikasi	8.90	4.38	3.75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.39	4.27	5.18
12	Real Estat	5.07	6.93	3.14
13	Jasa Perusahaan	7.20	6.25	1.56
14	Administrasi Pertahanan	8.70	2.04	2.20
15	Jasa Pendidikan	9.69	5.96	6.53
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.52	8.37	4.41
17	Jasa Lainnya	4.17	8.67	5.36
<b>PDRB</b>		<b>5.44</b>	<b>4,85</b>	<b>5,12</b>

Sumber : PDRB Kab Tapin Tahun 2018

### E. Pengangguran dan Kemiskinan

Perkembangan ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di Tapin cukup spesifik. Hal ini khususnya kalau dilihat dari perkembangan tingkat pengangguran yang cenderung untuk terus menurun. selama rentang waktu 2013-2015. Pada saat bersamaan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan PDRB tergolong rendah

**Tabel 3.5.**  
Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tapin  
Tahun 2014-2017

	Uraian	2014	2015	2017
a	Jml Penduduk 15 Tahun Keatas	129.647	131.865	136.301
	a. Angkatan Kerja	92.425	94.619	98.027
	- Bekerja	90.766	89.760	93.726
	- Pengangguran	1.659	4.859	4.301
	b. Bukan Angkatan Kerja	37.222	37.246	38.274
b	TPAK %	71,29	71,75	71,92
c	Tingkat Pengangguran	1,79	5,14	4,39
	TPT Kalsel (%)	3,80	3,87	4,50

Sumber : diolah kembali dari Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS 2018

Pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk rata-rata bertambah 1,64 persen per tahun. Tidak jauh beda dengan itu, tingkat penyerapan tenaga kerja juga berlangsung positif. Selama rentang waktu 2014-2017 jumlah pekerja tumbuh dengan rata-rata 1,75 persen per tahun, dengan tingkat pertumbuhan sebesar ini maka kesempatan kerja Tapin cukup prospektif karena berada di atas tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Oleh karena itu dari tahun ketahun akan semakin sedikit pencari kerja yang tidak terserap.

Sementara itu perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin cukup fluktuatif, baik secara relatif maupun absolut jumlah penduduk miskin turun dari 7.010 orang di tahun 2015 menjadi 6.810 orang di tahun 2016, dan naik menjadi 7.011 di tahun 2017 dengan proporsi 3,88 persen menjadi 3,70 persen dan naik menjadi 3,77 persen.

**Tabel 3.6.**  
**Perkembangan penduduk miskin**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017**

No	Tahun	Penduduk miskin	Persentase
1	2015	7.010	3,88
2	2016	6.810	3,70
3	2017	7.811	3,77
<b>Rata-rata</b>			<b>3,78</b>

Sumber : : <http://kalsel.bps.go.id>

### 3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 diupayakan dengan perencanaan yang secermat mungkin sehingga mampu untuk mencukupi rencana perubahan yang terjadi dalam belanja daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019. Penerimaan dalam rencana perubahan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan terhadap obyek-obyek PAD yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek PAD yang bersangkutan dan diupayakan untuk tidak menjadikan beban bagi masyarakat, serta rencana perubahan dalam penerimaan pendapatan daerah tersebut didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif.

Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 sampai akhir tahun diprediksikan sebesar Rp.1.064.030.404.499,00 sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019. Pendapatan Daerah tersebut diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp.92.879.431.000,00 atau naik 8,73% menjadi Rp. 1.156.909.835.499,00.

Komposisi perubahan Pendapatan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

#### 3.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

PAD sampai akhir tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp.66.962.988.999 apabila dibandingkan dengan target awal PAD APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 64.362.988.999 yang berarti terjadi kenaikan sebesar Rp.2.600.000.000,00 atau 4,04%.

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah ini lebih disebabkan oleh naiknya Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.2.600.000.000,00 yaitu yang semula sebesar Rp.16.505.000.000,00 menjadi Rp.19.105.000.000,00 atau naik sebesar 15,75%.

### 3.2.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Yang Disetujui DPR RI.

Jumlah dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan dalam APBD 2019 sampai dengan penyusunan RKPD-P ini mengalami perubahan, yaitu naik sebesar Rp.100.279.431.000,00 atau 13,36% yang semula sebesar Rp.750.809.581.400,00 menjadi Rp.851.089.012.400,00.

### 3.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Sumbangan Pihak Ketiga.

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tapin Tahun 2019 sebesar Rp.248.857.834.100,00 dan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp.10.000.000.000,00 atau 4,02% sehingga menjadi Rp.238.857.834.100.

Data perubahan pendapatan daerah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.7. sebagai berikut :

**Tabel 3.7.**  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.064.030.404.499,00</b>	<b>1.156.909.835.499,00</b>	<b>92.879.431.000,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>64.362.988.999,00</b>	<b>66.962.988.999,00</b>	<b>2.600.000.000,00</b>
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	16.505.000.000,00	19.105.000.000,00	2.600.000.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	3.078.366.000,00	3.078.366.000,00	-
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.585.203.169,00	5.585.203.169,00	-
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.194.419.830,00	39.194.419.830,00	-
<b>4.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>750.809.581.400,00</b>	<b>851.089.012.400,00</b>	<b>100.279.431.000,00</b>
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	207.309.235.400,00	207.309.235.400,00	-
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	477.467.034.000,00	477.467.034.000,00	-
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	66.033.312.000,00	166.312.743.000,00	100.279.431.000,00
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>248.857.834.100,00</b>	<b>238.857.834.100,00</b>	<b>(10.000.000.000,00)</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	35.459.635.000,00	25.459.635.000,00	(10.000.000.000,00)
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	77.282.911.100,00	77.282.911.100,00	-
4.3.6.	Dana Desa Yang Bersumber Pada APBN	100.812.471.000,00	100.812.471.000,00	-
4.3.7.	Dana Insentif Daerah	35.302.817.000,00	35.302.817.000,00	-

Sumber : BPPRD Kabupaten Tapin

## BAB IV

## SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.

- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perubahan RKPD Kabupaten Tapin tahun 2019 merupakan bagian rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023.

Memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan memperhitungkan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan maka dirumuskan dan ditetapkan Visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023, yaitu :

***“Bersama mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”***

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tapin tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tapin selama 5 (lima) tahun (2018-2023) dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Misi, Tujuan dan Sasaran**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing	1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Tapin	1 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
			2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
			3 Meningkatnya daya beli masyarakat
			4 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan
			5 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa	2. Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	6 Meningkatnya Sektor Agrobisnis
			7 Meningkatnya Sektor Pariwisata
			8 Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM
			9 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
			10 Meningkatnya kemandirian pangan daerah
			11 Menurunnya Pengangguran
3	Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan	3. Meningkatkan kualitas infrastruktur	12 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
			13 Meningkatnya kualitas jaringan air bersih
			14 Meningkatnya kualitas jaringan ingasi
			15 Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik
		4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	16 Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi
			17 Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan
			18 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
4	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat	5. Meningkatnya investasi	19 Meningkatnya keamanan daerah
5	Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim	6. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	20 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
			21 Meningkatnya kualitas ASN

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
	pelayanan publik yang maksimal ( <i>Good and Clean Government</i> )		22 Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat

#### 4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah pada tahun rencana yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga dengan mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2019 yaitu :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan dan Permukiman
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
5. Ketahanan Energi
6. Ketahanan Pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemiskinan
9. Pengembangan Wilayah
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Fokus utama dan arah RKP 2019 adalah untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yang menjadi agenda Nawacita dan Agenda Trisakti.

Target utama RKP 2019 adalah terwujudnya pembangunan nasional yang berkualitas, yang dicerminkan oleh sumber-sumber pertumbuhan yang merata secara kewilayahan. Pelaku ekonomi harus berdistribusi luas, tidak terbatas pada pelaku ekonomi besar saja tetapi disokong oleh pelaku ekonomi menengah ke bawah yang terus berkembang sehingga menghasilkan perekonomian Indonesia yang kokoh, tahan terhadap guncangan regional dan global.

Sedangkan untuk Prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan yang akan mendukung RKPD Tahun 2019 adalah :

1. Kalsel Cerdas